LAPORAN MONITORING KINERJA
TRIWULAN II
TAHUN 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Paser
Tanah Grogot

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan..... 2
B. Maksud dan Tujuan..... 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi..... 3
D. Struktur Organisasi..... 4
E. Sumber Daya Manusia..... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2026 10
B. Sasaran Capaian Kinerja I..... 11
C. Sasaran Capaian Kinerja II..... 14
D. Realisasi Anggaran 16

BAB IV PENUTUP 25

LAMPIRAN..... 26

BAB I
PENDALUHULUAN

A. Dasar pembentukan Organisasi

Peran Badan Kesbangpol di masyarakat adalah memelihara dan meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kerukunan antar elemen masyarakat. Kesbangpol juga memfasilitasi dialog dan pemberdayaan masyarakat, melakukan pendidikan politik agar masyarakat aktif berpartisipasi, dan menjaga kewaspadaan terhadap paham radikal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah lembaga strategis di pemda dalam menjaga dan memelihara stabilitas politik, kerukunan, dan wawasan kebangsaan masyarakat, terutama menjelang dan selama Pemilu. Dengan struktur organisasi yang mengedepankan sekretariat, bidang Kesatuan Bangsa, Politik & Ormas, dan dukungan untuk forum keamanan sosial seperti FPK, FKUB dan FKDM, badan ini aktif menyelenggarakan berbagai program edukatif, sosialisatif, dan fasilitatif di wilayah Kabupaten Paser.

Tugas dan Fungsi Badan kesbangpol di bentuk berdasarkan peraturan bupati Paser nomor 28 Tahun 2023 tentang susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan kinerja triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Kab. Paser 2026 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selaku penerima kewenangan dan Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenahi tingkat pencapaian target triwulan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bagian / bidang untuk mewujudkan visi,misi,tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Adapun tujuan dari pada penyusunan laporan triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026 adalah :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja badan Kesbang dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026;
2. Memberikan laporan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Paser.
3. Terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program / kegiatan kerja secara afesien, efektif dan responsive serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Paser, mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mempunyai tugas dan fungsi Sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;

b) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;

c) Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d) Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;

e) Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;

f) Perumusan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

g) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

l) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;

m) Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

n) Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksanapada Badan;

o) Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

p) Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

q) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

s) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariatmempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan. Selain melaksanakan tugas sekretariat juga menyelenggarakan fungsi:

a) Pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja.
b) Pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c) Perumusan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d) Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;
e) Pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikanstandar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan;
f) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
g) Pelaksanaan administrasi keuangan Badan;
h) Pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Badan;
i) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan;
j) Pelaksanaan administrasi umumBadan;
k) Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah;
l) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
m) Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusanpemerintahan Daerah;
n) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan;
o) Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;

p) fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;

q) fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;

r) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internalserta pengelolaan informasi dan dokumentasi;

s) Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan;

t) Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

u) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

v) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan;

w) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan;

x) Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

y) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

z) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Badan;

aa) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

C. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Ideologi, Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalamPengambilan Kebijakan dibidang Kesekretariatan

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;
b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
f) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
h) Pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
i) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
j) Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

l) Pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

m) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

n) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

o) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

p) Pelaksanaan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat aka n pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

r) Pelaksanaa penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan

t) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

a) **Perencanaan** program Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) **Pemberian** petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d) **Pemberian** petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Politik Dalam egeri dan Organisasi Kemasyarakatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

f) **Pelaksanaan** kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

h) Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

i) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

j) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah;

l) Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

m) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

n) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas. evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

o) Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaranormas, pemberdayaan ormas. evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

p) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan;

q) Pelaksanaan penilaian tugasbawaha n melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Sadan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

s) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpinoleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan P e rumusan kebijakan, memberi petunjukpelaksanaan kebijakan mengevaluasidan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik juga menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Badan;

b) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d) Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

e) Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

f) Pelaksanaan kebijakan diBidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

g) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

h) Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

i) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penangana konflik di Daerah;

j) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

k) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

l) Pelaksanaan forum kordinasi pimpinan Daerah;

m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan;

n) Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

o) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan

p) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan

D. Struktur Organisasi

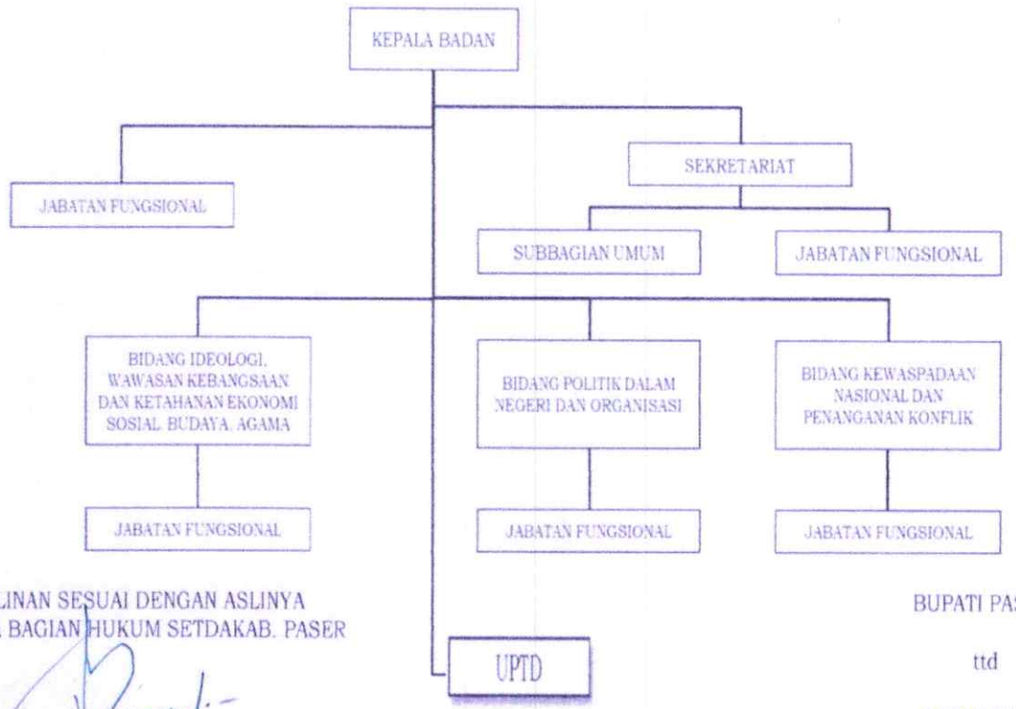
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199303 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di klasifikasikan ke dalam tabel 2.1. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	8
2	S1	18
3	D III	1
4	SLTA	8
5	SLTP	1
	Total	36

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1 di atas, tingkat pendidikan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cukup memadai. Tingkat pendidikan aparatur yang paling banyak adalah berpendidikan sarjana atau Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 18 orang (50 %). Selanjutnya kedua terbanyak adalah adalah berpendidikan Pasca Sarjana atau Strata 2 (S2), yaitu sebanyak 8 orang (22.22 %). Sedangkan ketiga terbanyak tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 8 Orang (22.22%). Sedangkan ke empat dan kelima terbanyak adalah berpendidikan Diploma 3 sebanyak 1 Orang (2,78 %) Dan berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 Orang (2.78%). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Pegawai yang latar belakang Pendidikan Strata 3, Diploma 4, dan Sekolah Dasar.

Dari jumlah pegawai sebanyak 36 orang ini kemudian dientukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan.Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	23
2	Perempuan	13
	Total	36

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2026 Triwulan II

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	1
4	JF	4
5	Pelaksana	27
	Total	36

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2026

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Diklat PIM TK II	1
2	Diklat PIM TK III	2
3	Diklat PIM TK IV	4
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	12
5	Pelatihan Kepemipinan Pengawas (PKP)	1
	Total	10

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Paser, 2026

juga merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3

PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PASER TAHUN 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA THN 2025	TARGET KINERJA THN 2026	TARGET KERJA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan stabilitas dan harmoni kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Meningkatkan penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani.	100 %	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	75 %	80 %	-	80%	-	80 %
		Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsadan Politik	76,60	76,70	-	-	76,70	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

Peranggungjawaban kinerja yang tepat dan terukur merupakan media untuk mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026, disajikan dalam bentuk perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser 2026 sebagai berikut :

Tabel 4

MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SASARAN strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah	Persentase konflik Ipoleksosbud yang dapat ditangani.	100	0	0
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	0	0
		Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsadan Politik	76,70%	-	-

Untuk lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN I YAITU MENINGKATKAN PENANGAN KONFLIK IPOLEKSOSBUD DIDAERAH

TERDIRI DARI :

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Tabel 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	0 %	0 %

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan Target Kinerja 100 % dan Capaian Kinerja sebesar 0 % dan dengan jumlah Anggaran Rp. 2.845.031.139,- realisasi Anggaran sebersar Rp 327.550.771 untuk menunjang Kegiatan ini didukung dengan sub. Kegiatan sebagsi berkut ;
   a. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan demgam relisasi Capaian kinerja sebsar 0) % dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 0 / Nihil
   b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan demgam relisasi Capaian kinerja sebsar 0 % dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 3.935.200,-

c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan relisasi Capaian kinerja sebsar 0 % dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 0/Nihil

d. Pembentukan Paskibraka dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 80 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 320.565.571

Dari target capaian kinerja sasaran I Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencapai Target hal ini disebabkan Kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila sudan selesai dilaksanakan tapi karena masih menunggu Proses Efisiensi Selesai dilaksanakan sehingga belum bisa melakukan Pencairan Anggaran dan Sebagian Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Tabel 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pendidikan politik pada masyarakat dan kader partai politik	1,60%	0	0,%

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembags Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningktan Demokrasi , Fasilitasu kelembagaan Pemerintahan , perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi di Daerah dengan Target Kinerja sebesar 100 % dan Capaian Kinerja sebesar 0% dan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.388.072.075 dan baru terrealisasi Anggarannya sebersar Rp 732.462.433,untuk menunjang Kegiatan ini didukung dengan beberapa Sub, Kegiatan sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 0 /Nihil/

   b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 1.200 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 686.777.605,-

   c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 0 /Nihil.

   d. Pelaksanaan tugas Paskibraka dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Kegiatan dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp.75.654.828,-

Dari target capaian kinerja sasaran II Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencapai Target hal ini disebabkan Sub.Kegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sudan selesai dilaksanakan tapi karena masih menunggu Proses Efisiensi Selesai dilaksanakan sehingga belum bisa melakukan Pencairan Anggaran dan Sebagian Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYA-RAKATAN

Tabel 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Organiasi Kemasya rakatan yang aktif.	15%	0	0.

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdaayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan dengan Target kinerja 100 % dan Capaian Kinerja sebesar 0, % dan dari jumlah Anggaran sebesar Rp. 212.913.186 realisasi Anggaran sebersar Rp. 14.582.704, yang didukung oleh beberapa Sub. Kegiatan yaitu sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 14.313.904,-

   b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 144.000,-

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Laporan dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 124.800,-

Dari target capaian kinerja sasaran III Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencaapai Target hal ini disebabkan Kegiatan baru akan dilaksankan pada Triwulan III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETA HANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Tabel 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya dengan target Kinerja yaitu 100 % dan capaian Kinerja sebesar 0.% dan jumlah Anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- baru terrealisasi Anggaran sebesar Rp.3.552.000 yang didukung dengan beberapa sub. Kegiatan diantarnya sebgi berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 0 / Nihil.

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 3.552.000,-

c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Laporan dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp0/Nihil.,-

Dari target capaian kinerja sasaran IV Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencapai Target hal ini disebabkan akan dilakukannya Penyesuaian Rencana akibat adanya Kebijakan Efesiensi Anggaran dan Sebagian Kegiatan sepenuhnya baru akan dilaksankan pada Triwulan III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Tabel 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	100 %	0 %	00 %

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dsn Penanganan Konflik Sosial dengan Target Kinerja sebesar 100 % Capaian Kinerja sebesar 0%, dan Jumlah Anggaran senesar Rp. 1.143.897. realisasi Anggaran sebesar Rp. 250.364.643 yang didukung oleh beberapa sub. Kegiatan diantaranya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 87.024,-

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp365.870,-

c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Laporan dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 140.378,-

Dalam mencapai sasaran I didukung dengan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial meliputi 1 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu :

1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dsn Penanganan Konflik Sosial dengan Target Kinerja sebesar 100 % Capaian Kinerja sebesar 0%, dan Jumlah Anggaran senesar Rp. 1.143.897. realisasi Anggaran sebesar Rp. 250.364.643 yang didukung oleh beberapa sub. Kegiatan diantaranya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 87.024,-

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Orang dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp365.870,-

c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Laporan dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 140.378,-

d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan relisasi Capaian kinerja sebesar 0 Laporan dan realisasi keuangan /Anggaran sebesar Rp. 249.773.371,-

Dari target capaian kinerja sasaran V Nilai realisasi Capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya belum mencapai Target hal ini disebabkan Kegiatan sebagian Sudah dalam Proses Pelaksanaan tapi Proses Pencairan masih menunggu Proses Efesiensi selesai dilaksanakan selaain itu Kegiatan Sepenuhnya baru akan dilaksankan pada Triwulan III dan ke IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

SASARAN II YAITU MENINGKAT KUALITAS LAYANAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TERDIRI DARI

6 PROGRAM **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB. / KOTA**

Tabel 6

Pengukuran Kinerja sasaran ii Meningkatnya Nilai Kinerja Manajemen Internal Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan esatuan Bangsa dan Politik Serta Meningkatnya Nilai Kinerja Manajemen Internal	**80 %**	-	
Nilai Evaluasi SAKIP dan AKIP	76,70	-	-

Dalam mencapai sasaran II didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabu[aten / Kota meliputi 8 kegiatan dengan Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran sebagai berikut yaitu

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan Target Kinerja 100 % dan Capaian Kinerja 40 % dan Jumlah anggarn utuk yajun 2026 adalah Rp. 135.980.368, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.23.166.309,- didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Target kinerja sebanyak 3 Dokumen dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II terealisasi 2 dokumen
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan dengan Target kinerja sebanyak 2 Dokumen dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II terealisasi 1 Dokumen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan Target kinerja sebanyak 2 Dokumen dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II terealisasi 1 Dokumen
   a. Evalusi Kinerja Perangkat Daerah dengan dengan Target kinerja sebanyak 4 Laporam dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II terealisasi 2 Laporan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target kinerja 97% Orng/bulan dan Capaian kinerja 40% dan Target Anggaran Rp. 8.249.943.277,- dan realisasi Anggarannya sebesar Rp. 2.878.508.332 didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi 36 Orang /bulan
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD demgam Realisasi 70 dokumen
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah degan Target Kinerja 96% dan realisasi Capaian Kinerja sebesar 40 % dan jumlh anggaran utuk Tahun 2026 sebesar Rp. 146.335.300 , tetapi realisasi Anggaranmya sampai engan triwulan II ini masih Rp. 0 / Nihil. Untuk emperkancar Kegiatan ini didukung dengan beberapa sub .Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan Realisas capaian kinerja 36 Paket namun masih dalam proses pencairan.

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan Realisasi 0 hal ini disebabkan Pelaksanaan dilaksanakan pada Triwulam III

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Realisasi 0 hal ini disebabkan Pelaksanaan dilaksanakan pada Triwulam III dan IV

d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kepegawaian dengan Realisasi 0 hal ini disebabkan Pelaksanaan baru akan dilaksanakan pada Triwulam III.

e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan Realisasi 0 hal ini disebabkan Pelaksanaan baru akan dilaksanakan pada Triwulam III dan Triwulan IV

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah degan Target Kinerja 96 % dan Capaian Kinerja sebesar 33,85 % dan Adapun jumlah anggaran Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 296.735. 835 ,- dan anggaran yang sudah terealisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 100.435.186,-, untuk mendukung kelancaran Kegiatan tersebut didikung oleh beberapa Sub, Kegiatan antara lain sebagai berikut :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Realisasi 1 Paket dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 2.998.589,-

   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Realisasi 1 Paket dan realisasi keuanggan sebesar Rp 13.342.200,-

   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Realisasi 1 Paket dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 10.532.407,-

   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Realisasi 0 Paket dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 0/ Nihil.

   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Realisasi 1 Dokumen dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 2.190.000,-

   f. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Realisasi 0 Laporan an realisasi keuanggan sebesar Rp. 0/Nihil

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Realisasi 2 laporan dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 71.371.990,-

h. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD dengan Realisasi01 Dokumen dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 0/ Nihil.

5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan Target Kinerja sebesar 100 % dan realisasi capaian kinerja sebesar 0 % dari Jumlah anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 0,- , untuk menunjang Kegiaan ini didukungoleh 1 Sub. Kegiatan yaitu

   a. Pengadaan mebel dengan realisasi kinerja masih 0 disebabkan pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III

6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Kinerja sebesar 100 % dan realisasi capaian kinerja sebesar 25 % dari Jumlah anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 22.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.633.420.- untuk menunjang Kegiaan ini didukung oleh 2 Sub. Kegiatan sebagai berikut : :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Realisasi 0 laporan dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 0/Nihil

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Realisasi 6 laporan dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 4.633.420,-

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah dengan Taeget Kinerja sebesar 100 % baru terealisasi capaian kinerja sebesar 0 % dan dari Jumlah Anggarn untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 60.960.000,- realisasi Anggaran sebesar Rp. 0 / Nihil , Untuk menunjang kegiatan tersebut didukung dengan 2 (dua) sub. Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Realisasi 0 Unit dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 0/Nihil/

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Realisasi 0 Unit dan realisasi keuanggan sebesar Rp. 0/Nihil/

Dari target capaian kinerja sasaran II Nilai realisasi Capaian kinerja masih belum sesuai denan target kinerja begitu pun dengan Realisasi Anggarannya baru sebesar 3.006.743.147,- hal ini disebabkan Pelaksanaan Kegiatan lebih diutamakan pada hal yang bersifat proiritas saja seperti pada Kegiatan Administrasi Keungan Perangkat Daersh meliputi Gaji dan Tunjangn ASN (PNS dan PPPK) dan Kegiatam Perencanaan , Penganggaran dan Ealuasi Perangkat Daerah , selain karena adanya Intruksi Bupati Paser No. 4 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026,Kegiatan yang lain akan dilaksanakan padaTriwulan III dan IV tetapi kinerja pendukung lainya telah dilaksanakan.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 7

Realisasi Anggaran

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Capaian (%)
1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	2.845.031.139	327.550.771,-	2.517.480.368,,-	11.515

2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik melalui Pendidian Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningktan Demokrasi , Fasilitasu kelembagaan Pemerintahan , perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi di Daerah	5.388.072.705,-	762.432.433.,-	4.485.641.272,-	14.63%
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdaayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	212.913.186	14.582.704,-	198.330.482,-	6,85 %
4	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan	90.000.00,-	3.552.000-	86.448.000,-	3,95 %

	dan Budaya	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya				
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kwalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dsn Penanganan Konflik Sosial	1.143.897.369,-	250.364.643	893.532,726,-	21,89 %
6	Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabu[aten / Kota	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	135.980.368,-	23.166.309,-	112.814.059,-	17,04 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.249.943.277,-	2.878.508.332,-	5.371.434.945,- ,-	34,89 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.335.300,-	0,-	146.335.300,-	0 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.735.835,-	100.435.186,-	196.300.649,-	33,85 %
		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang	10.000.000,-	0	10.000.000,-	0 %

		Urusan Pemerintah Daerah				
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000-	4.633.320,-	17.336.680,-	21,06%
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah	60.960.000-	0	60.960.000-,-	0 %

Dari realisasi Keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam Pagu Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser pada Tahun 2026 sebesar Rp. 18.461.870.179,- sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp.4.365.225.698,- artinya 23,63 % Realisasi Capaian Kinerja belum mencapai target yang ditentukan

BAB IV
P E N U T U P

Demikian hal-hal yang dapat dilaporkan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser triwulan Kedua tahun 2026.

Tanah Grogot, 4 Agustus 2026

Kepala Badan Kesbangpol



Nonding, S.Sos,M.M

Pembina Utama Muda/IVC

NIP. 19710607 199703 1 007

Lampiran :

1. Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
2. Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
3. Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
4. Dokumentasi Rapat Evaluasi kinerja trwiwulan II

1. Undangan Rapat Evaluasi Renja Triwulan II

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : https://kesbangpol.paserkab.go.id E-mail: kesbangpol_paser@yahoo.com

Tana Paser, 3 Agustus 2026

Nomor : B.900/ 57 /BKBP-PK/VIII/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan II tahun 2026

Yth. 1. Sekertaris
2. Plh. Kepala Bidang Wawasan kebangssan
3. Kepala Bidang Wasnas
4. Kepala Bidang Poldagri
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
7. JF. Perencana Ahli Muda
8. JF Perencana Ahli Pertama
9. ASN dan PPPK masing – Masing Bidang

Di - Tana Paser

Dalam rangka Evaluasi dan Monitoring Renja TriwulanII pada badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2026 maka Perlu Dilakukan Koordinasi dan Evaluasi Serapan Anggaran Tahun 2026 .

Berkenaan dengan har tersebut diatasengan ini Kami mengundang Bapa / Ibu semua untuk dapat hadir pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 04 Agustus 2026
Jam : 15.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang rapat Kesabangpol kab. Paser
Kegiatan: rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan II Tahun 2026

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan atas kerja samanya diucapakan terima kasih/

Kepala Badan Kesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN PASER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nonding, S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19710607 199703 1 007

2. **Daftar Hadir Rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan II**

Daftar hadir rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Trwiiuwan ii

Hari : SELASA
Tanggal : 04 Agustus 2026
Jam : 15.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kesbngpol

No	Nama	Tanda tangan	
1	2	3	
1	Nonding,S.Sos.M.M	1	
2	Hatimah,S.Sos,M.Si		2
3	Achmad Hartono,S,Sos,M,Si	3	
4	Nur Alam,SE,M.M		4
5	Sudirman ,S.Sos	5	
6	Hanik yanuati,SP		6
7	Hainun.A, SE, M.M	7	
8	Deri Fitriadi,ST		8
9	Sri Wahdanigsih, SE	9	
10	Norwahidah,SE		10
11	Syarkiah,SE	11	
12	Jatmiko,SE.M.M		12
13	Wahyurita,SE	13	
14	Iswati Ningsih.SIP		14
15	Mahyudin	15	
16	Julianty Siahaan,S.AK		16
17	Arbain DH,SE	17	
18	Dian Asih Handayani		18
19	Ahmad Hamidy	19	

Kepala Badan Kesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PASER

Nonding, S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19710607 199703 1 007

3. Notulen Rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Triwulan II Tahun 2026

NOTULEN RAPAT

ACARA/RAPAT : RAPAT EVALUASI DAN MONITORING RENJA TRIWULANi I TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : Selasa ,04 Agustus 2026

TEMPAT : RUANG RAPAT KABAN KESBANGPL KAB. PASER

WAKTU : 15.00 S/D SELESAI

PIMPINAN RAPAT : KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. PASER

NOTULIS RAPAT : JF. PERENCANA AHLI MUDA

AGENDA RAPAT :

1. Pembukaan Rapat oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Polittik Kab. Paser
2. Kemudian Sekretaris menyampaikan Agenda Rapat tentang Pengendalin dan Evaluasi Renja untuk Trwulan II TA.2026 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasinya , dimana hasil dari kegiatan Evaluasi renja ini terdapat pada Form 80. Dan Laporan Realisasi Dan Keuangan Sampai dengan Bulan Maret 2026
3. Rapat dihadiri oleh Sekretaris, JF. Perencana Ahli pertama dan muda, Kasubbag Umum dan kepagawaian dan seluruh Kabid serta JF.Analis Kebijakan Ahli Muda dan ASN dan PPPK pada Sub. Bidang masing - masing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dari hasil diskusi dan Tanya Jawab dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :
   a. Evaluasi Renja Triwulan II (April sampai dengan Juni) Tahun 2026, Dengan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 23,85 % atau Rp. 4.365.225.698,- dari total Anggaran sebesar Rp. 18.486.870.179.
   b. Dari Realisasi Penyerapan Anggatan dapat Disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja untuk Triwulan II ((APRIL – JUNI) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mash 0 %, hal ini disebabkan adanya Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagai dampak dari kebijakan Efesiensi Anggaram leh sevab itu krgiatan tersebut telah dijadwalkan ulang dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada Triwulan III dn IV
   c. Diharapkan untuk di tiwulan Berikutnya Kegiatan sudah bisa berjalan sesuai dengan Program , Kegiatan dan Sub. Kegiatan dan Pagu Anggaran yang telah tersedia pada DPA Badan Kesbangpol. Kab. Paser
5. Rapat Selesai pada Jam 16.30 dengan Kesepakatan Bersama bahwa, untuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Renja triwulan III dan IV ,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser akan lebih meningkatkan Koordinasi dan Pengendalian pada Seluruh Bidang dan Sekretariat sehingga Realiasi Anggaran dan Kinerja dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditentukan .

Notulis rapat
JF. Perencana Ahli Muda

Hainun.A,SE
NIP.197607121996032004

4. Dokuntasi /Foto Rapat Evaluasi dan Monitoring Renja Trwiwulan II TA. 2026



Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : 2026

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: 2025-2029
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara		Indeks Harmoni Indonesia																					
	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																					
			Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73,08	99.506.823.188	87,58	14.607.500.017	72,68	18.461.870.179		1.791.188.184		2.574.037.514,00											
	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	90%	38.478.213.151	87,12%	6.335.361.598	100%	8.921.954.780		1.404.764.763		1.601.978.384,00	-	-	-	-	-	3.006.743.147		9.342.104.745	0,00	24,28	Sekretaris
	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	1.250.594.941	100%	169.903.446	100%	135.980.368		14.892.309		8.274.000,00	-	-	-	-		23.166.309		193.069.755		15,44	JF Perencana Ahli Muda
			Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	100																				JF Perencana Ahli Muda
			Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	100																				JF Perencana Ahli Muda
			Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	100																				JF Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	15	450.151.565	3	91.548.843	3	56.460.000	2	11.474.690	0	300.000,00		-	-	-	2	11.774.690	5	103.423.533	33,33	22,98	JF Perencana Ahli Muda
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan satuan:Dokumen)	10	287.380.000	2	33.280.794	2	30.620.368	1	1.197.954	1	7.974.000,00		-	-	-	2	9.171.954	4	42.452.748	40,00	14,77	JF Perencana Ahli Muda
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan satuan:Dokumen)	10	210.000.000	2	15.560.822	2	18.300.000	1	779.665	0	-		-	-	-	1	779.665	3	16.340.487	30,00	7,78	JF Perencana Ahli Muda
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	20	303.063.376	4	29.412.987	4	30.600.000	2	1.440.000	0	-		-	-	-	2	1.440.000	6	30.852.987	30,00	10,18	JF Perencana Ahli Muda
	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	100%	32.438.352.229	97%	5.588.989.459	97%	9.249.943.277		1.350.936.844		1.527.571.488	-	-	-	-	-	2.878.508.332		8.467.497.791		26,10	JF Perencana Ahli Muda
			Persentase LHP Nihil	100%																				JF Perencana Ahli Muda
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	190	31.674.778.019	36	5.397.566.533	38	8.136.102.000	38	1.329.459.004	36	1.519.667.888		-	0	-	74	2.849.126.892	110	8.246.693.425	57,89	26,04	JF Perencana Ahli Muda
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan satuan:Dokumen)	1000	763.574.210	270	191.422.926	200	113.841.277	70	21.477.840	30	7.903.600		-	-	-	100	29.381.440	370	220.804.366	37,00	28,92	JF Perencana Ahli Muda
	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80 (Dengan Satuan:Persen)	84%	2.010.045.774		-	96%	146.335.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	72	146.000.000		-	36	74.000.000	0	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan satuan:Dokumen)	5	446.787.924		-	1	24.000.000	0	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan satuan:Dokumen)	5	262.816.435		-	1	19.965.300	0	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	7	150.000.000		-	5	28.370.000	0	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan:Orang)	55	1.004.441.415		-			0	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100%	1.744.936.272	96%	503.027.042	96%	296.735.835	12,17	36.122.830	21,67	64.312.356	-	-	-	-	33,85	100.435.186	34,81	603.462.228	34,8	34,58	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	21.453.125	1	2.303.000	1	3.000.000	0	-	1	2.998.589		-	-	-	1	2.998.589	2	5.301.589	40,00	24,71	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	172.629.670	2	171.352.900	2	29.573.035	0	-	1	13.342.200		-	-	-	1	13.342.200	3	184.695.100	30,00	106,99	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	183.971.498	2	50.070.819	2	30.700.000	0	-	1	10.532.407		-	-	-	1	10.532.407	3	60.603.226	30,00	32,94	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	183.971.498	2	32.026.047	2	27.000.000	0	-	0			-	-	-	-	-	2	32.026.047	20,00	17,41	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	5	28.384.174	1	2.700.000	1	4.500.000	0	-	1	2.190.000		-		-	1	2.190.000	2	4.890.000	40,00	17,23	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	5	5.256.329	4	3.375.000	4	1.000.000	0	-	0	-		-		-	-	-	4	3.375.000	80,00	64,21	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	20	1.047.874.219	4	241.199.276	4	194.712.800	1	36.122.830	1	35.249.160		-		-	2	71.371.990	6	312.571.266	30,00	29,83	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD(Dengan Satuan:Dokumen)	20	101.395.759		-	4	6.250.000	0	-	-	-		-		-	-	-	-	-	0,00	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya Inventaris barang milik daerah yang tercatat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase inventaris barang milik daerah tercatat (Dengan Satuan:Persen)	100	102.012.500	100%	4.888.000	100%	10.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.888.000	0,0	4,79	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	102.012.500	1	4.888.000	1	10.000.000	0	-	0	-		-		-	-	-	1	4.888.000	20,00	4,79	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100%	73.075.943	100%	20.872.185	100%	22.000.000		2.812.780		1.820.540	-	-	-	-	-	4.633.320	1,00	25.505.505		34,90	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	4	10.000.000	4	9.455.000	4	10.000.000	0	-	-	-		-		-	-	-	4	9.455.000	100,00	94,55	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	60	63.075.943	12	11.417.185	12	12.000.000	3	2.812.780	3	1.820.540		-		-	6	4.633.320	18	16.050.505	30,00	25,45	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100%	525.712.852	100%	47.681.466	100%	60.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	47.681.466	1,0	9,07	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	15	262.856.426	3	35.966.466	3	43.710.000	0	-	0	-				-	-	-	3	35.966.466	20,00	13,68	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	50	262.856.426	4	11.715.000	10	17.250.000	0	-	0	-				-	-	-	4	11.715.000	8,00	4,46	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	2. Meningkatnya Penanganan Konflik Ipoleksosbud di daerah		Persentase Konflik Ipoleksosbud yang dapat di tangani	100																					
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	100%	10.687.261.985	95%	3.250.069.260	100%	2.845.031.139		43.849.318		283.701.453	-	-	-	-	-	327.550.771		3.577.620.031	0,00	33,48	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan (Dengan Satuan : Persen)	100	10.687.261.985	95%	3.250.069.260	100%	2.845.031.139		43.849.318		283.701.453	-	-	-	-	-	327.550.771		3.577.620.031	0,0	33,48	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dengan satuan:Orang)	250	500.000.000	2	151.190.070	3	84.598.600								-	-	2	151.190.070	0,80	30,24	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125	500.000.000	90	503.355.069	25	41.685.661		3.935.200						-	3.935.200	90	507.290.269	72,00	101,46	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dengan Satuan:Keluarga)	200	1.057.261.985		-	40	30.000.000								-	-	-	-	0,00	-	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	500	8.130.000.000		2.595.524.121	100	2.628.746.878		43.849.318		276.716.253					-	320.565.571	-	2.916.089.892	0,00	35,87	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dengan Satuan:Dokumen)	5	500.000.000		-	1	60.000.000				3.050.000					-	3.050.000	-	3.050.000	0,00	0,61	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang
	Meningkatnya etika dan budaya politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada masyarakat dan kader partai politik (Dengan Satuan:persen)	1,60	32.306.349.090	100%	2.339.934.195	100%	5.248.073.705		167.770.435		594.661.998	-	-	-	-	-	762.432.433		3.102.366.628	0,00	9,60	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	Meningkatnya implementasi kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	32.306.349.090	100%	2.339.934.195	100%	5.248.073.705		167.770.435		594.661.998	-	-	-	-	-	762.432.433		3.102.366.628	0,0	9,60	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	1800	1.957.396.300	120	55.649.363	150	76.377.270									-	-	120	55.649.363	6,67	2,84	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	500	28.638.986.153	105	2.196.789.613	100	4.066.910.000		143.653.507		543.124.098					-	686.777.605	105	2.883.567.418	21,00	10,07	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan den Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	1.482.972.637	3	87.495.019	2	60.848.091									-	-	3	87.495.019	25,00	5,90	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri
	Terlaksananya pengawasan paskibraka	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dengan satuan : Kegiatan)	10	227.000.000		-	4	1.043.938.344		24.116.928		51.537.900					-	75.654.828	-	75.654.828	0,00	33,33	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Poldagri
	Meningkatnya Ketersiban Organitasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:persen)	15%	1.829.926.065	99%	353.550.702	100%	212.913.186		14.582.704	-	-	-	-	-	-	14.582.704	0,99	368.133.406	6,61	20,12	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	1.829.926.065	99%	353.550.702	100%	212.913.186		14.582.704	-	-	-	-	-	-	14.582.704	0,99	368.133.406	0,0	20,12	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan	1000	790.847.200	289	240.689.929	200	96.705.386		14.313.904	0					-	14.313.904	289	255.003.833	28,90	32,24	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	650	521.000.000	120	63.827.349	100	65.965.000		144.000	0					-	144.000	120	63.971.349	18,46	12,28	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas
	Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	518.678.865	2	49.033.424	2	50.242.800		124.800	0					-	124.800	2	49.158.224	20,00	9,49	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Ormas
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan	100%	5.972.293.539	65%	774.748.767	100%	90.000.000		1.920.000		1.632.000	-	-	-	-	3.552.000		778.300.767	0,00	13,03	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika , fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	Persentase Sosialisasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	5.972.293.539	65%	774.748.767	100%	90.000.000		1.920.000		1.632.000	-	-	-	-	3.552.000		778.300.767	0,0	13,03	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3	336.738.482			0	-	0					-	-	3	336.738.482			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakandi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dengan satuan : Orang)	750	750.000.000			3	30.000.000								-	-	-	-	0,00	-	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	600	2.531.033.546	400	413.481.985	120	30.000.000		1.920.000		1.632.000				-	3.552.000	400	417.033.985	66,67	16,48	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang

	Terlaksananya Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	20	2.691.259.993	4	24.528.300	4	30.000.000									-	-	4	24.528.300	20,00	0,91	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasbang
	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (Dengan Satuan:Persen)	100%	10.232.779.358	74%	1.553.835.495	100%	1.143.897.369		158.300.964		92.063.679	-	-	-	-	-	250.364.643		1.804.200.138	0,00	17,63	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	10.232.779.358	74%	1.553.835.495	100%	1.143.897.369		158.300.964		92.063.679	-	-	-	-	-	250.364.643		1.804.200.138	0,00	17,63	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2	21.727.698			0		0	-					-	-	2	21.727.698			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah			2	72.632.685		-	0	-	0	-					-	-	2	72.632.685			
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	375	1.400.000.000	20	76.450.018	75	60.000.000		87.024							-	87.024	20	76.537.042	5,33	5,47	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	2500	1.656.000.000	20	376.539.168	500	60.000.000		363.870							-	363.870	20	376.903.038	0,80	22,76	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas
	Terlaksananya Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	20	1.797.000.000	5	167.750.086	4	57.799.600		140.378							-	140.378	5	167.890.464	25,00	9,34	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	20	5.379.779.358	2	838.735.840	4	966.097.769	1	158.300.964	1	91.472.407					2,00	249.773.371	4	1.088.509.211	20,00	20,23	JF Kebijakan Ahli Muda Bidang Wasnas
									Rata-rata capaian kinerja (%)									23,64	4.365.225.698				118,14	
									Predikat Kinerja									Sangat Rendah						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :

Disusun
Tanah Grogot,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Paser

Nanding, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199703 1 007

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

OPD : 8.01.0.00.0.00.00.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi sampai dengan : 30 Juni 2026

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Target		Pagu	Bobot	Perubahan/Pergeseran Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
							Rp.	%	
1	2	3	4		5	6	7	8	10
1	8.01.0.00.0.00.00.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			18,461,870,179	100.00	4,365,225,698	23.64	14,096,644,481
2	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,921,954,780	48.33	3,006,743,147	33.70	5,915,211,633
3	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			135,980,368	0.74	23,166,309	17.04	112,814,059
4	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	56,460,000	0.31	11,774,690	20.85	44,685,310
5	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	30,620,368	0.17	9,171,954	29.95	21,448,414
6	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	18,300,000	0.10	779,665	4.26	17,520,335
7	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	30,600,000	0.17	1,440,000	4.71	29,160,000
8	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,249,943,277	44.69	2,878,508,332	34.89	5,371,434,945
9	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org/Bulan	8,136,102,000	44.07	2,849,126,892	35.02	5,286,975,108
10	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200	Dokumen	113,841,277	0.62	29,381,440	25.81	84,459,837
11	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			146,335,300	0.79	-	0.00	146,335,300
12	8.01.01.2.05.0002	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36	Paket	74,000,000	0.40	0	0.00	74,000,000
13	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	24,000,000	0.13	0	0.00	24,000,000
14	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	19,965,300	0.11	0	0.00	19,965,300
15	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Orang	28,370,000	0.15	0	0.00	28,370,000
16	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			296,735,835	1.61	100,435,186	33.85	196,300,649
17	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	3,000,000	0.02	2,998,589	99.95	1,411
18	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	29,573,035	0.16	13,342,200	45.12	16,230,835
19	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Paket	30,700,000	0.17	10,532,407	34.31	20,167,593
20	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Paket	27,000,000	0.15	0	0.00	27,000,000
21	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	4,500,000	0.02	2,190,000	48.67	2,310,000
22	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	1,000,000	0.01	0	0.00	1,000,000
23	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	194,712,800	1.05	71,371,990	36.66	123,340,810
24	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	6,250,000	0.03	0	0.00	6,250,000
25	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10,000,000	0.05	-	0.00	10,000,000
26	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1	Unit	10,000,000	0.05	0	0.00	10,000,000

27	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22,000,000	0.12	4,633,320	21.06	17,366,680
28	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	10,000,000	0.05	0	0.00	10,000,000
29	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12,000,000	0.06	4,633,320	38.61	7,366,680
30	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60,960,000	0.33	-	0.00	60,960,000
31	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	43,710,000	0.24	0	0.00	43,710,000
32	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit	17,250,000	0.09	0	0.00	17,250,000
33	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			2,845,031,139	15.41	327,550,771	11.51	2,517,480,368
34	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2,845,031,139	15.41	327,550,771	11.51	2,517,480,368
35	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	Orang	84,598,600	0.46	0	0.00	84,598,600
36	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25	Orang	41,685,661	0.23	3,935,200	9.44	37,750,461
37	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40	Keluarga	30,000,000	0.16	0	0.00	30,000,000
38	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	100	Orang	2,628,746,878	14.24	320,565,571	12.19	2,308,181,307
39	8.01.02.2.01.0010	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen	60,000,000	0.32	3,050,000	5.08	56,950,000
40	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			5,248,073,705	28.43	762,432,433	14.53	4,485,641,272
41	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan			5,248,073,705	28.43	762,432,433	14.53	4,485,641,272
42	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150	Orang	76,377,270	0.41	0	0.00	76,377,270
43	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	4,066,910,000	22.03	686,777,605	16.89	3,380,132,395
44	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	Laporan	60,848,091	0.33	0	0.00	60,848,091
45	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4	Kegiatan	1,043,938,344	5.65	75,654,828	7.25	968,283,516

46	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			212,913,186	1.15	14,582,704	6.85	198,330,482
47	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			212,913,186	1.15	14,582,704	6.85	198,330,482
48	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200	Orang	96,705,386	0.52	14,313,904	14.80	82,391,482
49	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	Orang	65,965,000	0.36	144,000	0.22	65,821,000
50	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	Laporan	50,242,800	0.27	124,800	0.25	50,118,000
51	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			90,000,000	0.49	3,552,000	3.95	86,448,000
52	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			90,000,000	0.49	3,552,000	3.95	86,448,000
53	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Orang	30,000,000	0.16	0	0.00	30,000,000
54	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120	Orang	30,000,000	0.16	3,552,000	11.84	26,448,000
55	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	Laporan	30,000,000	0.16	0	0.00	30,000,000
56	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1,143,897,369	6.20	250,364,643	21.89	893,532,726
57	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1,143,897,369	6.20	250,364,643	21.89	893,532,726
58	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75	Orang	60,000,000	0.32	87,024	0.15	59,912,976
59	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500	Orang	60,000,000	0.32	363,870	0.61	59,636,130
60	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	4	Laporan	57,799,600	0.31	140,378	0.24	57,659,222
61	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	966,097,769	5.23	249,773,371	25.85	716,324,398
		TOTAL			18,461,870,179	100.00	4,365,225,698	23.64	14,096,644,481

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kusuma Bangsa KM. 5 Tanah Grogot Kab. Paser Kode Pos 76211
Email : kesbangpol_paser@yahoo.com bakesbangpolpaser@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Seluruh Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dilimgkungan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
Dari	:	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
Tembusan	:	-
Tanggal	:	20 Agustus 2026
Nomor	:	P.700/ / BKBP-PK/VIII/2026
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Hal	:	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kinerja Berkala

1. DASAR

a. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Permenpan RB - 53 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja
c, Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021: Tentang Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
d. Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

2. PERINTAH DAN ARAHAN

- Diminta kepada Saudara/i untuk melaksanakan pemantauan, pengukuran serta evaluasi Realisasi kinerja secara berkala setiap Bulan dan Triwulan, dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi kinerja yang telah disediakan, melalui langkah sebagai berikut:

a. Melengkapi Pengisian Data Capaian Kinerja Perbulan dan Triwulan
Memasukkan data capaian kinerja, hasil pengukuran realisasi, serta mencantumkan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Menguraikan Faktor & Rekomendasi
Menuliskan faktor yang mendukung keberhasilan maupun menjadi penghambat pencapaian target, kemudian menyusun Rencana Aksi Perbaikan / RATL yang jelas beserta jadwal pelaksanaannya.

c. Menyampaikan Umpan Balik / Tindak Lanjut
Melakukan pemberian umpan balik, pantau perkembangan tindak lanjut perbaikan agar kendala segera teratasi.

d. Menyusun Analisis Lengkap
Menyajikan uraian analisis penyebab keberhasilan maupun penyebab belum tercapainya target, lalu merumuskan rekomendasi langkah strategis yang harus dilaksanakan ke depan untuk meningkatkan kinerja instansi.

3. KETENTUAN PENYAMPAIAN
Hasil pengisian dan analisis tersebut selesai dilaporkan dan dikirim pada Bagian Perencanaan paling lambat:

- Laporan Bulanan: Tanggal 7 setiap akhir bulan berjalan
- Laporan Triwulanan: Tanggal 10 minggu pertama setelah akhir triwulan berakhir

4. PENUTUP
Demikian nota dinas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja SAKIP Badan Kesbangpol Kabupaten Paser yang lebih baik,dan atas kerja samanya diucapkan Terima kasih.

Kepala Badan

Nonding ,S,Sos,M.M
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP.19710607 199703 1007